V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan oleh peneliti serta hasil pembahasan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* dapat berpengaruh terhadap tingkat aspirasi pemilih pemula di SMA Al-Kautsar secara positif dan signifikan, ini berdasarkan pada temuan:

1) Kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik berpengaruh langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik.

2) Pembentukan *civic skills* siswa berpengaruh langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik semakin baik *civic skills* siswa akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.

3) kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik berpengaruh langsung terhadap *civic skills* siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. hal ini menunjukan semakin baik kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik akan ada kecenderungan *civic skills* siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik

4) pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* berpengaruh langsung terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. hal ini menunjukan semakin baik pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.

5) pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui pembentukan *civic skills* berpengaruh terhadap tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula secara positif, erat dan signifikan. hal ini menunjukan semakin baik pemahaman siswa dalam memahami konsep budaya politik melalui pembentukan *civic skills* akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik pula.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara praktis terhadap upaya peningkatan aspirasi politik siswa sebagai pemilih pemula yang masih awam terhadap kondisi perpolitikan negara indonesia, dan hal ini akan rentan

dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mendapatkan keuntungan dari suara politik mereka dengan cara yang kotor. Peningkatan aspirasi politik siswa sebagai pemilih pemula dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa dalam memahami konsep budaya politik dan meningkatkan kemampuan guru dalam pembentukan *civic skills* siswa.

Upaya memahamkan siswa tentang konsep budaya politik merupakan hal yang penting dilaksanakan oleh para guru dalam hal ini siswa sebagai pemilih pemula yang masih sangat awam dalam perpolitikan demokrasi indonesia. Pemaknaan konsep budaya politik kepada siswa merupakan bagian dari pendidikan politik yang sampai saat ini sepertinya terlupakan oleh kita semua. Pemahaman yang baik mengenai budaya politik tentu akan meningkatkan aspirasi politik mereka sebagai pemilih pemula yang berupa menyuarakan ide dan pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Upaya pembentukan *civic skills* siswa sangat penting dilaksanakan oleh guru terutama guru mata pelajaran PKn dalam rangka mewujudkan regenerasi warga negara yang baik dan cerdas (*Good and Smart Citizen*) menuju masyarakat madani dalam demokratisasi indonesia. Guru yang telah mampu membentuk *civic skills* siswa dengan baik tentu akan memberikan contoh dari aplikasi teori yang diberikannya dengan harapan siswa mampu meniru dan menerapkannya pula dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam menerapkan konsep mengutamakan kewajiban dari pada hak. Siswa yang telah mampu mengaplikasikan *civic skills* nya akan mampu menganalisis, mengevaluasi, mengambil/menentukan dan mempertahankan pendapat tentang isu-isu public

dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari partisipasi politik mereka sebagai warga negara. secara sedehana pemahaman *civic skills* siswa akan membuat mereka lebih mementingkan kewajiban dari pada hak mereka dan hal tersebut akan membuat mereka bijaksana dalam berwarga negara. oleh karena itu, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang memancing argumen dan pendapat siswa secara aktif dan membantu mereka untuk mempertahankan pendapatnya. Ini dapat dilaksanakan misalnya dengan diskusi kelompok atau debate kelas. Guru juga dapat menerjunkan siswa dalam masyarakat sebagai bagian dari labolatorium politik dengan panduan studi kasus yang telah diberikan guru dan siswa menganalisisnya. Dalam materi konsep budaya politik, pembentukan *civic skills* merupakan pilar utama yang harus terintegrasi dalam pebelajaran karena berkaitan dengan mewujudkan regenerasi warga negara yang baik dan cerdas (*Good and Smart Citizen*).

Upaya memahamkan siswa tentang konsep budaya politik dan pembentukan *civic skills* disekolah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan pembelajaran PKn khususnya materi konsep budaya politik dengan diajarkan secara aplikasi praktisnya. Guru tidak hanya menjelaskan materi secara teoritis namun juga dilaksanakan praktek langsung agar lebih mendekatkan siswa dengan keadaan sebenarnya didalam perpolitikan di masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan misalnya dlam materi pemilu siswa dibelajarkan tentang situasi dan kondisi praktis saat berada di TPS dimana didalamnya ada ketua TPS,sekretaris, saksi, para pemilih, keamanan dan lain-lain. Dengan pembelajaran seperti ini maka siswa akan memahami hak dan kewajiban masing-masing simulasi dalam kegiatan praktek tersebut dan dapat langsung di aplikasikan dalam masyarakat.

Berkembangnya aspirasi dan tuntutan politik merupakan dinamika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan negara tentu dirasakan juga oleh para siswa sebagai warga negara yang telah mejadi pemilih pemula pemilih pemula. oleh karena itu, dalam pembelajaran PKn khususnya untuk materi budaya politik di Indonesia guru harus memahamkan secara jelas dan terperinci mengenai konsep budaya politik dan lebih baik pembelajarannya dilaksanakan secara praktis disamping dibelajarkan juga secara teoritis karena akan lebih memberikan pengalaman kepada siswa dan lebih mudah mengaitkan dengan isu-isu publik dalam lingkungan masyarakat sekitar.

5.3 Saran

1) Guru PKn hendaknya lebih memperluas dan memperkuat penguasaan materi konsep budaya politik dan meningkatkan kompetensi paedagogiknya agar siswa mampu menerima dan memahami materi budaya politik dengan baik. Selain itu siswa juga diajak melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara, serta menambah wawasan pengetahuannya dengan isu-isu aktual, agar dapat memancing siswa untuk mampu berpikir lebih kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya.
2) Guru PKn hendaknya menjadikan masyarakat sosial sebagai laboratorium politik, agar pemahaman, sikap, dan perilaku budaya politik dikembangkan bukan semata-mata melalui ”pendidikan politik” secara teoritis saja tepai juga secara praktis, tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung

menerapkan cara hidup berpolitik (*doing politic)* dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

3) Kepada pihak sekolah agar lebih memberikan fokus perhatian pada proses pembelajaran PKn khususnya dalam materi budaya politik dengan menyediakan labolatorium PKn yang dapat dipergunakan untuk praktek pembelajaran materi-materi PKn yang membutuhkan aplikasi praktisnya.
4) Kepada pemerintah khususnya pada KPU setempat agar memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya di SMA yang didalamnya terdapat banyak sekali siswa yang telah mempunyai hak untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Hal ini dirasa lebih efektif untuk membangun karakter politik warga negara secara berkelanjutan.
5) Kepada peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mencermati atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula perlu memperhatikan atau mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan lebih sempurna. Untuk mengukur tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula perlu dilakukan pengamatan secara langsung bagaimana seorang guru melaksanakan proses pembelajaran materi budaya politik di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiyana, Marita.2009. *Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik.* *http://staff.uny.ac.id/dosen/marita-ahdiyana-sip-msi* (20 April 2012)

Alfian, Ilham Arifin.1998. *sistem politik Indonesia.* Surabaya: LPM IKIP.

Almond dan Verba, 1990, *Budaya Pollitik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Banks, J.A. 1997. *Educating Citizens in a Multicultural Society*. London: Teacher College Press.

Branson Margareth S .1999. *Belajar Civic Education dari Amerika Serikat*. Terjemahan Syafrudin, M dkk. Yogyakarta: LKIS.

Budimansyah, D.2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*. Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.

Budiarjo Miriam.2000. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiningsih, Asri .2008. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dedi Supriyadi.1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Sinar Grafika.

Djaali, H.2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Djamarah, Saiful Bahri dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ensiklopedia Umum. 1977. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Opset Kanisus.

Kartasasmita, Ginandjar.2004. *Budaya Politik Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia.* www.ginandjar.com/public/03Budaya Politik.pdf. [6 April 2012]

Manase Malo. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Kurnia.

Mona, Mohammad .2010. *Model Project Citizen Untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.* Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak diterbitkan.

Permendiknas no 14 tahun .2007. tentang *Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket* . www.pendidikan-diy.go.id/file/mendiknas/14.pdf. [6 April 2012]

Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rafael Raga Maran, 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rahman H.2007. *Sistem politik Indonesia,* Yogyakarta ; Graha Ilmu,

Santyasa, Wayan.2009. *Pengembangan pemahaman konsep dan kemampuan Pemecahan masalah bagi siswa sma dengan Pemberdayaan model perubahan konseptual Berseting Investigasi Kelompok www.freewebs.com/.../pdf2/PENGEMBANGAN_PEMAHAMAN_K...* [7 April 2012]

Sujarwo (2011). *pengaruh kemampuan guru dalam memahami konsep demokrasi dan kemampuan penerapan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembentukan Intellectual citizenship*. Program Pascasarjana Universitas Lampung. Tidak diterbitkan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. *Tentang Pemilu.* www.scribd.com/doc/.../UU-No-10-Tahun-2008-Tentang-Pemilu [7 April 2012]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. *Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.* www.tempo.co.id/hg/peraturan/2004/03/.../prn,20040316-04,id.html [8 April 2012]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. uk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen16-2007KompetensiGuru.pdf. [9 April 2012]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. *tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. www.pendidikan-diy.go.id/file/mendiknas/22.pdf. [6 April 2012]

UUSPN.2003. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS.* Bandung: Citra Umbara.

Winataputra, U, S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung: tidak diterbitkan.

Winataputra, U.S. dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.* Bandung: UPI.

Winataputra, U.S. dan Dasim Budimansyah. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif internasional.* Bandung: UPI.

Zuhro, Siti.2010. *Budaya Politik di Indonesia* http://documentstore.weebly.com/uploads/4/2/2/7/4227221/budaya_politik_di_indonesia.pdf. (20 April 2012)

_____.1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. http://www.freetechebooks.com/doc-2011/pengertian-sosialisasi-budaya-politik.html. (20 April 2012)